

BAB IV

PENUTUP

4.1. PENGANTAR

Dalam bab yang keempat ini penulis akan memaparkan tiga hal, yaitu pertama, penulis akan memaparkan mengenai relevansi dan sumbangan dari gagasan demokrasi Hatta ini; kedua, penulis akan memberi tanggapan kritis terkait pemikiran Hatta; dan ketiga adalah kesimpulan dari keseluruhan tulisan ini. Dalam kesimpulan ini penulis akan menjawab pertanyaan mendasar dari rumusan masalah tulisan ini.

4.2. RELEVANSI DAN SUMBANGAN GAGASAN HATTA

4.2.1. Relevansi

Dalam bab pertama tulisan ini, terutama dalam bagian latar belakang, penulis telah memaparkan beberapa contoh mengenai penerapan demokrasi di Indonesia. Contoh-contoh tersebut adalah mengenai kasus demonstrasi yang terjadi berjilid-jilid di DKI Jakarta terkait dengan pencampuran isu agama dalam politik, yang kemudian dianggap sebagai contoh bahwa demokrasi Indonesia sudah kebablasan; kasus kedua adalah kasus penyerangan diskusi di kantor LBH Jakarta yang dipandang sebagai pengkerdilan demokrasi yang berkaitan dengan kebebasan

berpendapat; dan ketiga adalah kasus ketimpangan ekonomi yang juga berpengaruh terhadap penerapan makna demokrasi.

Dalam kasus yang pertama, yaitu terkait dengan demonstrasi yang berjilid-jilid menjelang pemilu di DKI Jakarta tahun 2016 hingga tahun 2017 yang lalu, menurut penulis hal ini mengarah pada munculnya politik identitas dalam demokrasi Indonesia. Politik identitas adalah politik yang mengedepankan kepentingan identitas kelompok masyarakat tertentu, baik itu identitas agama, suku, ras, maupun golongan tertentu. Dalam situasi Indonesia saat ini, identitas yang digunakan dalam politik adalah identitas agama, khususnya agama Islam. Hal ini tampak dalam aksi demonstrasi yang dilaksanakan berjilid-jilid menggunakan identitas agama Islam untuk meraih dukungan dan mengumpulkan massa untuk kepentingan politik saat itu.

Hingga saat ini, dalam pemilu Presiden dan pemilu serentak tahun 2019 ini, isu politik identitas tersebut masih sangat terasa. Hal ini bisa kita lihat dalam media sosial, bahwa kampanye dengan memainkan isu agama masih sangat ramai dan mudah kita jumpai. Bahkan identitas-identitas agama sangat marak digunakan dalam kampanye yang dilakukan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa politik identitas ini bisa menjadi ancaman bagi pemilu di tahun 2019 ini. LIPI mengungkapkan bahwa politik identitas atau isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) jadi faktor tertinggi yang diprediksi akan menghambat gelaran Pemilu 2019. Rendahnya toleransi dipandang terkait dengan isu ini. Bahkan menurut LIPI, melalui survei yang dilakukan terhadap 145 ahli dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, pada

April-Juli 2018, dan dilakukan di 11 provinsi di Indonesia, diketahui bahwa faktor SARA atau politik identitas menjadi isu tertinggi yang bisa menghambat proses pemilu 2019.¹

Berkembangnya isu politik identitas seperti ini tentu menjadi ancaman yang serius bagi demokrasi di Negara Indonesia ini. Pemilihan umum yang merupakan wujud pelaksanaan demokrasi juga terancam tidak efektif dengan adanya isu politik identitas ini. Apabila terus dibiarkan berkembang, maka bukan tidak mungkin bahwa semakin lama demokrasi akan semakin terancam dan bahkan bisa berkembang jadi konflik antar golongan dalam negara. Bisa kita bayangkan betapa bahayanya politik identitas ini apabila kita merujuk pada sejarah kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia puluhan tahun lalu. Sejarah penganiayaan terhadap masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia dalam sejarah kita menjadi contoh permainan politik identitas yang mengedepankan identitas golongan tertentu dan membenci golongan yang lain.² Maka sangat jelas bahwa politik identitas adalah ancaman bagi pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dan tujuan dari demokrasi yang ingin mensejahterakan semua rakyat dalam semua golongan.

Begitu pula kaitannya dengan kebebasan berpendapat, bahwa apabila suatu kelompok berusaha ingin mengedepankan identitas kelompoknya sendiri saja, maka kebebasan berpendapat kelompok lain bisa terdiskriminasi. Hal ini bisa kita

1

Kustin Ayuwuragil, *Survei LIPI: Isu SARA Berpotensi Hambat Pemilu 2019*, 8 Agustus 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808090003-32-320434/survei-lipi-isu-sara-berpotensi-hambat-pemilu-2019>, (diakses pada 28 Januari 2019, pukul 17:04 WIB).

² Bdk. Arman Dhani, *Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa*, 1 September 2016, <https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp>, (diakses pada 29 Maret 2019, pukul 09.28 WIB).

lihat dalam kasus penyerangan kantor LBH Jakarta, yang juga telah penulis jelaskan dalam bab pertama. Apabila politik identitas itu sangat kuat, maka intimidasi terhadap Kedaulatan kelompok lain bisa terjadi. Apapun hal yang dianggap berseberangan dengan kepentingan kelompok tertentu bisa diprotes dan diintimidasi. Maka jelas bahwa hal ini sangat mencederai demokrasi. Kedaulatan Rakyat yang seharusnya bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat akan mati akibat egoisme kelompok yang hanya mementingkan diri sendiri saja.

Menanggapi isu ini, yaitu isu politik identitas yang juga bisa melebar ke isu kebebasan berpendapat ini, perlu bagi kita untuk melihat kembali makna Kedaulatan Rakyat yang disampaikan Hatta sebagaimana telah penulis jelaskan di bab sebelumnya, dan melihat sumbangan pemikiran Hatta ini bagi keadaan demokrasi Indonesia saat ini.

Dalam pemikirannya mengenai demokrasi, Hatta menekankan bahwa tidak boleh ada pembedaan dalam kehidupan bernegara. Dalam sebuah negara, terutama negara Indonesia, harus tercipta sebuah keadilan. Keadilan ini hanya bisa tercipta apabila tidak ada pembedaan satu dengan yang lain dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Keadilan ini hanya bisa terwujud dengan adanya semangat Kedaulatan Rakyat.³ Dalam arti ini kita bisa memahami bahwa semangat demokrasi adalah sebuah semangat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi setiap warga

³ Bdk. Seri Buku Tempo, *Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman*, Jakarta:KPG, Bekerjasama dengan Majalah Tempo, 2010, hlm. 148.

negara, dan semangat demokrasi ini harus didasari oleh semangat Kedaulatan Rakyat.

Kedaulatan Rakyat, bagi Hatta, berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan jalannya kekuasaan. Di negara Indonesia yang luas ini, pemerintahan rakyat ini kemudian dijalankan dengan sistem perwakilan. Rakyat memilih langsung wakilnya untuk menyuarakan kepentingan rakyat di pemerintahan. Namun, makna kekuasaan berada di tangan rakyat ini kemudian sering disalah-artikan di tengah masyarakat. Bahkan Hatta sendiri menyadari bahwa makna Kedaulatan Rakyat ini bisa diartikan bahwa setiap orang bisa bertindak atas nama rakyat padahal itu hanya demi kepentingan kelompoknya sendiri.⁴ Hatta sangat menolak gerakan yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Pergerakan atau kebebasan berpendapat harus dilakukan demi kepentingan rakyat secara umum dan dengan cara yang santun dan tidak menimbulkan kekerasan dan konflik.⁵

Dalam kaitannya mengenai maraknya isu politik identitas dewasa ini di Indonesia, bisa kita lihat berkaitan erat dengan pemahaman dan penafsiran mengenai makna Kedaulatan Rakyat ini. Massa yang menggaungkan isu politik identitas ini selalu mengatasnamakan demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Dalam melakukan aksi demonstrasi maupun aksi lainnya, mereka sering mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah sah secara demokrasi dan atas nama

⁴ Bdk. Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Bandung: Segarsy, 2014, hlm. 8.

⁵ Bdk. Salman Alfarizi, *Mohammad Hatta, Biografi Singkat 1902-1980*, Jogjakarta: GARASI, 2017, hlm. 107.

rakyat. Padahal, isu politik identitas ini adalah suatu kesalahan. Hal ini bisa jadi karena ada masyarakat yang masih tidak paham mengenai makna Kedaulatan Rakyat.

Demokrasi yang berlandaskan semangat Kedaulatan Rakyat, menurut Hatta memang memberikan kebebasan bagi rakyat untuk terlibat dalam mengatur jalannya pemerintahan. Bahkan rakyat memiliki hak untuk membantah dengan menyampaikan protes dengan cara umum segala peraturan negara yang dipandang tidak adil.⁶ Artinya aksi demonstrasi di depan umum untuk menyampaikan pendapat demi kepentingan rakyat banyak memang diperlukan dan diperbolehkan dalam demokrasi. Namun, hal yang sering menjadi masalah adalah bahwa dalam aksi tersebut kita mengatasnamakan kepentingan rakyat padahal demi meraih kepentingan bagi golongan tertentu saja. Hal ini yang kiranya yang tidak tepat. Isu politik identitas berarti hanya memperjuangkan satu golongan tertentu saja dan hal ini bisa menimbulkan konflik dengan golongan yang lain. Dalam arti ini berarti isu politik identitas bukanlah hal yang dibenarkan dalam demokrasi. Seharusnya yang terjadi adalah kelompok-kelompok masyarakat bisa menyampaikan aksi depan umum dan protes terhadap pemerintah dengan tetap mengedepankan semangat kebaikan bersama, yaitu untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan demi ambisi kelompoknya sendiri atau ambisi untuk meraih kekuasaan. Sementara apa yang terjadi di Indonesia saat ini, menurut penulis adalah upaya permainan kelompok tertentu yang membawa identitas tertentu untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan demi kelompoknya sendiri saja. Hal ini bisa kita lihat dari gerakan-

⁶ Lih. Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita. Op. Cit.*, hlm. 39.

gerakan mereka yang ingin memenangkan pemilu dengan memainkan identitas agama atau kelompok tertentu.

Bagi Hatta, demokrasi yang memberikan peluang bagi rakyat dalam mengatur negaranya, bukan berarti memberikan kebebasan bagi hanya sebagian rakyat namun kebebasan atas nama seluruh rakyat atau kebaikan bagi rakyat secara umum. Maka perlu bagi kita untuk menyadari bahwa Kedaulatan Rakyat juga ada batasnya. Batas dari Kedaulatan Rakyat adalah saat rakyat mengerti dan paham sungguh akan makna Kedaulatan Rakyat. Rakyat bisa berada di belakang pemerintah untuk mendukung program pemerintah yang adil dan sesuai dengan aspirasi rakyat, dan rakyat bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada demi kebaikan bersama apabila program pemerintah tidak sejalan dengan harapan rakyat. Jangan sampai praktik demokrasi atau Kedaulatan Rakyat ini justru menimbulkan konflik antar golongan di tengah masyarakat. Masyarakat harus tau bahwa Kedaulatan Rakyat berarti rakyat berada di belakang pemerintah dalam menjalankan pemerintahan bagi kepentingan seluruh rakyat.⁷ Artinya Kedaulatan Rakyat tidak boleh ditafsirkan sebagai rakyat bisa melakukan segala sesuatu dengan semaunya sendiri. Secara konkrit, batas Kedaulatan Rakyat adalah bertindak sesuai dengan kemauan rakyat keseluruhan dan mengedepankan keadilan bersama.

Dalam hal ini perlu diadakan kembali pendidikan bagi rakyat guna memahami sungguh makna Kedaulatan Rakyat ini. Hatta sendiri mengungkapkan bahwa peran partai politik seharusnya mengambil bagian yang besar dalam

⁷ Bdk. *Ibid.*, hlm. 9.

menyikapi hal ini. Partai politik harus menjadi barisan terdepan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Kerap kali partai politik justru menjadi bagian terdepan dalam menyebarkan isu kepentingan pribadi demi meraih kekuasaan. Hal ini yang harus dirubah. Partai politik harus memberi teladan dalam berorganisasi dan sungguh-sungguh menjadi pelopor politik yang santun dan menyuarakan kepentingan rakyat secara umum dan bukan hanya sekedar kepentingan kelompok saja. Selain itu, Hatta juga menjelaskan bahwa pemangku negara juga memiliki tugas yang sama, yaitu memberikan pembelajaran mengenai makna Kedaulatan Rakyat secara jelas kepada rakyat secara umum agar rakyat mengerti sungguh mengenai makna dan pelaksanaannya.⁸ Secara konkrit, menurut penulis, partai politik seharusnya bisa mengadakan penyuluhan kepada Rakyat di pelosok tanah air terkait dengan pengertian politik dan makna Kedaulatan Rakyat. Di lain pihak, pemerintah juga seharusnya bisa mengadakan pelatihan-pelatihan kebangsaan dan bila perlu memasukan pendidikan politik kebangsaan dalam kurikulum pendidikan di sekolah.

Dengan demikian, diharapkan bahwa dalam penerapannya, Kedaulatan Rakyat tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan semata atau tidak lagi digunakan demi kepentingan identitas golongan tertentu saja. Serta dengan memahami kembali makna Kedaulatan Rakyat, hendaknya kita juga bisa memahami bahwa kebebasan berpendapat memang dihargai dan tidak boleh terjadi diskriminasi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya.

⁸ Lih. *Ibid.*, hlm. 9.

Selain mengenai politik identitas, semangat demokrasi Indonesia juga terancam oleh ketimpangan ekonomi. Sebagaimana juga sudah penulis sampaikan di bab awal tulisan ini, bahwa menurut data dari Bank Dunia, kita bisa melihat bahwa ketimpangan ekonomi masih sangat terasa di Indonesia. Bank Dunia mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir ini pertumbuhan ekonomi hanya dikuasai oleh sekitar 20 persen orang terkaya di Indonesia. Artinya, kebanyakan orang Indonesia tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang kerap dijadikan indikator keberhasilan pemerintah. Salah satu penyebab dari ketimpangan ini adalah pemusatan kekayaan yang tinggi. Sebanyak 10 persen dari 20 persen orang terkaya Indonesia memiliki 77 persen seluruh kekayaan negara Indonesia. Pundi-pundi uang yang didapat dari aset finansial dan fisik mengalir hanya ke kantong para orang kaya sehingga penghasilan yang didapat lebih besar. Padahal masih ada 11,3 persen atau 28 juta orang miskin di Indonesia. Selain itu, ada pula 26,9 persen atau 68 juta orang rentan miskin yang bisa jatuh miskin karena situasi ekonomi saat ini.⁹

Ketimpangan ekonomi seperti ini juga bisa mengaburkan tujuan dari demokrasi, yaitu untuk kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Bisa kita bayangkan bahwa rakyat yang miskin tentu akan sulit menyuarakan kepentingannya dalam pemerintahan ketimbangan rakyat yang memiliki kekayaan materi. Ketimpangan ekonomi dan sosial sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik dan pemerintahan. Orang kaya tentu akan lebih bisa bersuara dalam

⁹ Nindias Nur Khalika, *Lingkaran Setan Ketimpangan Sosial di Indonesia*, 26 Februari 2018, <https://tirto.id/lingkaran-setan-ketimpangan-sosial-di-indonesia-cFhB>, (diakses pada 8 April 2018, pukul 11.38 WIB).

pemerintahan dibandingkan orang miskin. Orang miskin mungkin hanya akan sibuk untuk memikirkan mencari nafkah saja dibandingkan memikirkan urusan negara.

Selain itu, adanya ketimpangan ekonomi ini bisa membentuk kelompok-kelompok atau golongan dalam masyarakat dan bisa jadi ini akan mengembalikan kita ke masa kolonial dahulu, di mana yang miskin hanya akan tergantung kepada yang kaya saja, dan yang kaya akan menindas yang miskin dengan menjadikan yang miskin ini sebagai budak saja. Saat ini di Indonesia banyak dari masyarakat miskin yang terdiri dari petani dan nelayan, yang tinggal di pedesaan sulit untuk menerima penghasilan yang sesuai dan seimbang dibanding dengan kelompok-kelompok yang profesional serta terampil. Hal ini bisa membuat ketimpangan ekonomi Indonesia semakin melebar. Tingginya ketimpangan ekonomi ini juga bisa mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan.¹⁰ Semakin lebar dan tinggi ketimpangan ekonomi, maka semakin kecil juga peluang bagi terwujudnya tujuan demokrasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan semangat Kedaulatan Rakyat yang digagas oleh Hatta. Kedaulatan Rakyat adalah kekuasaan seluruh rakyat dan bukan hanya salah satu golongan atau individu rakyat saja, serta tujuan Kedaulatan Rakyat adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Apabila terjadi ketimpangan

¹⁰ Lih. Yenny Tjoe, *Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?*, 31 Agustus 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/31/100200826/seberapa-parah-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia->, (diakses pada 28 Januari 2019, pukul 17.18 WIB)

ekonomi dalam masyarakat, maka masyarakat miskin tidak mungkin bisa menggunakan Kedaulatannya dalam berpolitik. Hal ini karena orang miskin pasti hanya akan sibuk dengan urusan mencari nafkah saja tanpa mau memikirkan masalah negara dan pemerintahan. Meskipun mereka mau memikirkan mengenai pemerintahan, mereka juga pasti akan kalah dari suara orang-orang kaya yang bermodal yang ingin menguasai negara. Maka yang terjadi adalah bukan Kedaulatan Rakyat yang ada namun “kedaulatan bagi kaum bermodal”. Selain itu, cita-cita Kedaulatan Rakyat yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat juga tidak bisa tercapai karena apabila terjadi ketimpangan, yang ada hanya kesejahteraan kaum bermodal saja.

Dalam pemikiran Hatta terkait demokrasi, ia mendasarkan pemikirannya dengan mengkritik perkembangan demokrasi di Barat yang lebih mementingkan kebebasan individu. Hatta menolak demokrasi yang mengutamakan individualisme yang dia pandang sebagai demokrasi yang akan menguntungkan kaum pemodal saja. Tumbuhnya kaum kapitalis yang dominan dalam demokrasi individualisme akan menimbulkan perbudakan dan penindasan terhadap kaum yang lemah, terutama kaum buruh.¹¹ Maka dari itu, Hatta sangat mengharapkan demokrasi yang memiliki semangat gotong royong, rasa kebersamaan dalam menerima dan menolak suatu kebijakan, dan adanya pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat, serta pengimbang kekuatan bagi yang lemah terhadap yang kuat.¹²

¹¹ Bdk. Salman Alfarizi, *Mohammad Hatta, Biografi Singkat 1902-1980, Op. Cit.*, hlm. 106.

¹² Lih. *Ibid.*, hlm. 107.

Dalam hal ini, Hatta sesungguhnya menekankan sebuah demokrasi yang tidak hanya ada dalam bidang politik saja, namun juga dalam bidang ekonomi. Bagi Hatta, di samping demokrasi politik harus ada demokrasi ekonomi agar terciptanya semangat persaudaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³ Apabila demokrasi hanya ada dalam bidang politik saja, maka akan ada pasar dan persaingan bebas dalam perekonomian negara. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin tinggi dan hak setiap orang akan hilang, terutama hak bagi orang-orang yang kurang mampu. Apabila pasar bebas yang terjadi, maka sudah tentu bahwa yang menguasai pasar hanyalah orang-orang yang memiliki modal saja, dan yang miskin hanya akan tetap menjadi budak yang ditindas oleh yang bermodal. Hal ini juga tentu akan berpengaruh pada hak politik bahwa orang yang bermodal akan lebih mudah bersuara dalam sebuah negara. Apabila hal ini terjadi, maka pengertian dari Kedaulatan Rakyat, yaitu kekuasaan berada di tangan seluruh rakyat, tidak akan bisa diterapkan karena rakyat yang kurang mampu akan sulit mendapatkan akses untuk berpendapat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Menanggapi adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia ini, apabila kita merujuk pada pemikiran Hatta, maka ini akan menjadi Pekerjaan Rumah kita semua, terutama pemerintah dalam menekan ketimpangan sosial yang terjadi. Semua orang harus memiliki hak yang sama dalam memperoleh hidup yang layak. Namun dalam situasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, maka sulit untuk menjamin keadilan dalam menikmati hidup yang layak. Secara nyata memang hal

¹³ Mohammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2*, Jakarta: LP3ES, 2000, hlm. 435.

ini bukan hal yang mudah. Hatta memang mengusulkan sebuah sistem ekonomi yang berbentuk koperasi, yaitu semacam usaha untuk memberikan modal kepada rakyat kurang mampu untuk memulai usaha, dengan mengedepankan kekeluargaan¹⁴. Hal ini memang secara konkrit akan sulit diterapkan di Indonesia saat ini, namun, yang bisa diambil dari pemikiran Hatta di sini adalah pentingnya semangat persaudaraan, kebersamaan dalam komunitas dan kekeluargaan dalam pengelolaan ekonomi. Hal ini lah yang harus dimiliki dalam sistem perekonomian. Dalam semangat ekonomi koperasi ini pula, Hatta sesungguhnya menekankan agar seluruh hasil perekonomian diperuntukkan bagi rakyat. Bagi Hatta, pengelolaan tanah, air, hutan, laut, flora, fauna, dan mineral harus diperuntukkan bagi seluruh rakyat, terutama mereka yang kecil dan miskin.¹⁵

Apabila ada ketimpangan ekonomi sebagaimana fenomena yang disajikan di atas, maka jelas bahwa ada ketidakadilan dalam masyarakat. Akses bagi pengelolaan sumberdaya bisa jadi hanya terbuka bagi orang yang punya modal saja, sementara yang miskin tidak memiliki akses yang sama dengan yang kaya. Maka dapat kita simpulkan bahwa usaha-usaha ekonomi dalam negara harus tetap mengedepankan semangat kekeluargaan dan keadilan¹⁶ bagi seluruh rakyat

¹⁴ Perlu kita pahami bahwa makna “kekeluargaan” di sini bukan berarti semacam nepotisme, yaitu untuk menguntungkan keluarga sendiri. “kekeluargaan” di sini bermakna kebersamaan sebagai satu keluarga bangsa Indonesia, di mana setiap orang memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara.

¹⁵ Lih. Salman Alfarizi, *Mohammad Hatta, Biografi Singkat 1902-1980, Op. Cit.*, hlm. 108.

¹⁶ “Adil” yang dimaksudkan di sini adalah setiap warga negara mendapatkan hak yang sama sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pengelolaan negara harus bertujuan untuk semua warga negara dan bukan untuk salah satu golongan saja.

Indonesia untuk menekan ketimpangan sosial agar tidak terjadi penindasan bagi rakyat yang miskin dan kekuasaan hanya bagi yang bermodal saja.

4.2.2. *Sumbangan Pemikiran Hatta*

Dari pemaparan relevansi di atas dapat kita lihat bahwa pemikiran Hatta masih sangat relevan untuk merefleksikan penerapan demokrasi Indonesia saat ini. Pemikiran Hatta mengenai makna Kedaulatan Rakyat seharusnya menjadi inspirasi dalam menerapkan demokrasi hingga saat ini. Dalam bagian ini, penulis akan merangkum relevansi pemikiran Hatta ini terkait dengan sumbangan pemikirannya dalam situasi demokrasi Indonesia saat ini.

Pertama adalah terkait dengan politik identitas dan kebebasan berpendapat. Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas bahwa politik identitas ini juga berkaitan erat dengan kebebasan berpendapat, dan politik identitas ini bisa berbahaya bagi penerapan demokrasi di Indonesia. Dalam mengatasi hal ini maka menurut penulis, perlu dilaksanakan pendidikan politik bagi rakyat agar memahami sungguh makna Kedaulatan Rakyat sebagaimana yang diusulkan oleh Hatta. Hatta memang menekankan bahwa pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik dan pemerintah. Namun, hingga saat ini kita belum bisa melihat secara tampak dan konkrit adanya upaya dari partai politik dan pemerintah untuk memberi pengertian mengenai makna Kedaulatan Rakyat atau makna demokrasi bagi rakyat. Mungkin yang ada hanya sekedar himbuan dan sosialisasi yang juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagaimana peran rakyat dalam demokrasi.

Menyikapi hal tersebut, maka pemikiran Hatta mengenai pendidikan politik bagi rakyat ini bisa menjadi sumbangan bagi kemajuan politik di Indonesia, khususnya penjelasan mengenai makna Kedaulatan Rakyat bagi seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan agar rakyat sadar bahwa Kedaulatan Rakyat bukan berarti rakyat bisa bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan emosional semata, namun rakyat bisa bergerak demi kebaikan bersama. Pendidikan politik ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara berdialog dengan masyarakat melalui perangkat daerah hingga desa dengan cara bersosialisasi dengan rakyat, atau bila perlu, menurut penulis, pemerintah bisa memasukannya dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah agar sejak dini rakyat sudah diberi pemahaman yang benar terkait politik dan kehidupan bernegara, khususnya mengenai makna Kedaulatan Rakyat. Apabila rakyat sejak dini sudah diberi pengertian dan pengetahuan yang baik, maka kelak rakyat yang tergabung dalam partai politik juga merupakan rakyat yang sudah paham betul mengenai perannya dalam partai politik. Sehingga keberadaan partai politik bisa sungguh-sungguh menjadi wadah bagi rakyat untuk terlibat dalam kehidupan bernegara, khususnya menjadi perpanjangan lidah rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi-aspirasi rakyat demi terciptanya kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama.

Kedua, sumbangan pemikiran Hatta ini juga sangat relevan dalam hal perekonomian. Dalam pengertian mengenai makna Kedaulatan Rakyat, jelas bahwa tujuan dari Kedaulatan Rakyat adalah kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara. Namun dalam Negara Indonesia yang masih memiliki ketimpangan sosial seperti ini maka akan sulit untuk memperoleh keadilan. Akses pendidikan,

pekerjaan, dan hak hidup layak, serta kemudahan dalam hak hidup bernegara akan sulit dicapai oleh rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Dalam hal ini sumbangan Hatta adalah harus ada upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hatta juga menekankan nilai kekeluargaan dan keadilan dalam mengelola perekonomian negara.

Dalam hal ini, menurut penulis, Hatta memiliki sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Pemerintah bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dengan cara membentuk tim untuk terjun langsung ke masyarakat, terutama masyarakat daerah, kemudian menyerap kebutuhan apa yang mendesak bagi masyarakat. Setelah itu pemerintah bisa membahas kebijakan dan memutuskan kebijakan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga harus membangun sumber daya manusia secara merata agar seluruh masyarakat mampu bersaing dalam keterampilan dan menjadi pekerja profesional dalam dunia usaha dengan membangun sekolah-sekolah dan sarana pendidikan yang merata. Selain itu, adanya investor yang masuk, harus juga menguntungkan bagi rakyat. Contoh misalnya apabila ada perusahaan masuk, harus ada perjanjian dengan pemerintah bahwa perusahaan itu mau melibatkan masyarakat setempat dalam usahanya. Selain itu, apabila daerah tersebut sumber daya manusianya dan fasilitas umumnya kurang, perusahaan investor tersebut mau membangun sumberdaya manusia dengan membangun sekolah atau badan pelatihan, serta bekerjasama dengan pemerintah membangun daerah tersebut. Dengan demikian, demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan sumber daya manusia bisa terpenuhi,

sehingga setiap warga negara mampu bersaing dalam persaingan nasional dengan kemampuan yang sama. Dengan ini maka orang kaya atau pemilik modal tidak lagi hanya menjadi penindas bagi yang miskin, namun dengan semangat kekeluargaan bisa saling menolong dan bekerjasama. Dengan adanya peran dari pemodal (investor) dalam membangun perkembangan rakyat, maka pengelolaan seluruh sumber daya bangsa juga bisa menguntungkan seluruh rakyat.

4.3. TANGGAPAN KRITIS

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bahwa sesungguhnya pemikiran Hatta ini masih sangat relevan untuk direfleksikan hingga saat ini. Pemikiran Hatta ini sangat perlu untuk di refleksikan kembali mengingat situasi politik Indonesia saat ini, khususnya saat munculnya isu politik identitas yang bisa mengaburkan tujuan Kedaulatan Rakyat dan masih adanya ketimpangan ekonomi yang bisa menimbulkan ketidak-adilan dalam masyarakat. Merefleksikan kembali demokrasi Hatta ini bisa menjadi kesegaran baru untuk kembali melihat apa sesungguhnya tujuan dari demokrasi dan bagaimana seharusnya masyarakat menggunakan Kedaulatannya sebagai warga negara.

Meskipun demikian, harus kita akui bahwa pemikiran Hatta tidak mungkin bisa sepenuhnya untuk diterapkan dalam situasi negara saat ini. Hal ini karena situasi sekarang sudah berbeda dengan situasi dahulu pada masa Indonesia baru merdeka, di mana Hatta menyampaikan pemikirannya ini. Pada zaman Indonesia baru merdeka, sistem negara masih mungkin untuk didiskusikan untuk mencari sistem apa yang pantas dan bagaimana penerapannya. Termasuk sistem demokrasi

ini, meskipun rumit, namun masih mungkin untuk dievaluasi kembali penerapannya. Contoh misalnya dalam sistem demokrasi langsung, yang kemudian berganti dengan cukup mudah dengan Dekrit Presiden tahun 1959 menjadi demokrasi terpimpin dan presidensial, yang kemudian berubah lagi menjadi demokrasi langsung pasca demokrasi hingga saat ini. Sementara di masa sekarang, memang bukan tidak mungkin untuk mengevaluasi sistem demokrasi ini. Namun masyarakat sudah terlanjur memandang demokrasi dengan sistem pemilihan umum secara langsung ini adalah sistem yang terbaik. Maka apabila dirubah kembali, penulis melihat akan bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Selain itu, konteks pemikiran Hatta pada awal kemerdekaan tentu berbeda dengan masyarakat sekarang yang sudah berkembang dalam sumber daya manusia maupun perekonomian.

Meskipun tidak mungkin untuk diterapkan secara utuh apa yang dipikirkan Hatta terkait sistem demokrasi bangsa ini, kita tetap bisa mengambil semangat dari apa yang Hatta pikirkan dan usulkan. Di masa sekarang ini, penulis menilai bahwa semangat dari negara demokrasi sudah ada. Hal ini tampak dari sistem pemilu yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan adanya kebebasan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun hal yang kurang adalah pengertian atau pengetahuan rakyat akan makna Kedaulatan Rakyat ini agar Kedaulatan dan kebebasan yang ada pada rakyat tidak disalah-tafsirkan seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Maka, dari sini jelas bahwa pemikiran Hatta ini masih relevan untuk direfleksikan di zaman sekarang ini.

Meskipun pemikiran Hatta ini relevan dan baik, penulis menemukan masih ada kekurangan dalam pemikiran Hatta yang dia sampaikan dalam karya *Demokrasi Kita* ini. Penulis menilai Hatta tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pendidikan politik yang baik bagi rakyat agar rakyat bisa paham mengenai makna Kedaulatan Rakyat seperti yang dia maksud. Hatta seakan melempar begitu saja kepada pemerintah bahwa pendidikan politik itu harus diberikan oleh pemerintah dan oleh partai politik, padahal orang yang duduk di kursi pemerintahan dan yang bergabung dalam partai politik sendiri belum tentu orang yang sudah paham makna Kedaulatan Rakyat ini. Hal ini karena pemerintahan dan partai politik juga berasal dari rakyat, apabila rakyat memilih pemimpin yang tidak paham politik untuk memimpin di pemerintahan maka tentu yang terjadi adalah pemerintah juga tidak paham politik, bagaimana mungkin orang yang tidak paham diminta untuk memberi pendidikan bagi yang sama-sama tidak paham?

Hal yang kedua yang kurang dari pandangan Hatta ini, menurut penulis, adalah kesiapan masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini. Hatta sesungguhnya menyadari betul bahwa masyarakat Indonesia pada waktu itu belum siap untuk menjalankan sistem demokrasi karena rentan disalahartikan. Hal ini tampak dalam pandangannya yang mengatakan bahwa “dalam praktik dunia nyata (dalam menerapkan Kedaulatan Rakyat) kita menghadapi halangan karena kita berhadapan dengan sifat manusia yang lamban dan tidak mudah menerima hal yang baru”.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Hatta sadar dengan kelemahan masyarakat Indonesia dalam menerima konsep Kedaulatan Rakyat ini. Maka menurut penulis,

¹⁷ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita. Op. Cit.*, hlm. 7.

seharusnya Hatta juga bisa memikirkan jalan keluar untuk memberikan pemahaman bagi rakyat, agar rakyat siap dengan sistem Kedaulatan Rakyat ini dan tidak salah menafsirkannya sebagai kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan apa saja bagi dirinya.

Terkait hal ini, menurut penulis, jalan keluarnya adalah pendidikan Kedaulatan Rakyat. Namun harus diperjelas mengenai pelaksanaan pendidikannya. Maka di sini penulis menilai harus dimulai dari dunia pendidikan itu sendiri. Orang-orang yang paham mengenai Kedaulatan Rakyat bisa menularkannya kepada rakyat yang lain dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi calon kader partai politik dan calon wakil rakyat yang akan dipilih baik calon DPR maupun calon presiden dan wakil presiden. Setelah orang-orang ini terpilih masuk dalam pemerintahan, maka mereka sudah paham mengenai Kedaulatan Rakyat. Kemudian pemerintah bisa memasukan kurikulum pendidikan Kedaulatan Rakyat ini di sekolah-sekolah formal sebagaimana yang penulis sampaikan di bagian sumbangan pemikiran Hatta di atas. Sehingga semua rakyat akhirnya paham dan siap untuk menjalankan sistem demokrasi ini dengan baik.

Selain itu, penulis melihat bahwa secara pemikiran, konsep demokrasi Hatta ini banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir filsafat, khususnya filsafat politik. Hal ini tampak dalam pemikirannya mengenai sistem demokrasi yang dilandasi semangat kekeluargaan dan semangat musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini penulis melihat bahwa Hatta sadar bahwa setiap individu pasti memiliki kepentingan. Apabila setiap individu ini terus mengutamakan kepentingannya sendiri-sendiri, maka akan terjadi perpecahan. Maka, musyawarah untuk mufakat

adalah jalan untuk menyatukan kepentingan individu ini kemudian menjadi kepentingan bersama. Hal ini sangat mirip dengan konsep kontrak sosial yang pernah diutarakan oleh Hobbes maupun Rousseau yang telah penulis paparkan dalam bagian latar belakang tulisan ini.

Pemikiran demokrasi Hatta yang mengedepankan jalan musyawarah dan mufakat ini, menurut penulis juga hampir mirip dengan pemikiran salah satu tokoh filsafat Kontemporer, yaitu Jürgen Habermas. Dalam pemikirannya, Habermas memandang bahwa tindakan komunikatif sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ia berpendapat bahwa tindakan komunikatif dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan mengenai dominasi dan penindasan yang kental terjadi pada masa modernitas. Dengan tindakan komunikatif ini Habermas berharap bahwa para pihak yang sedang bertikai dapat menyelesaikan persoalannya. Dalam komunikasi, gangguan akibat bahasa dan perbedaan pemahaman serta ideologi dapat mengganggu jalannya tindakan komunikatif. Habermas membangun diskursus etika untuk menghindari distorsi-distorsi komunikasi. Diskursus etika yang dimaksudkan oleh Habermas adalah suatu justifikasi normatif untuk mencapai kesesuaian kepentingan antar anggota (*generalizable interest*).¹⁸

Melalui diskursus etika, menurut Habermas, kita dapat memahami dan mengerti tindakan komunikatif dengan argumen-argumen terbaiknya dengan “keyakinan-keyakinan rasional”. Demi mencapai “keyakinan-keyakinan rasional”

¹⁸Datu Hendrawan, Makalah *Extension Course* 2016, *Bonum Commune Dalam Teori-Teori Kritis (Upaya Membentuk Masyarakat Kritis)*, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2016, Hlm. 16.

tersebut, Habermas kemudian merumuskan syarat-syarat komunikatif sebagai mana yang terangkum dalam *the ideal speech situation* (situasi percakapan yang ideal).

Syarat komunikatif tersebut adalah:¹⁹

1. Semua peserta mempunyai peluang yang sama untuk mengemukakan argumen-argumen dan mengkritik argumen-argumen peserta lain;
2. Tidak ada perbedaan kekuasaan di antara para peserta yang dapat menghindari bahwa argumen-argumen yang mungkin relevan sungguh-sungguh diajukan juga;
3. Semua peserta mengungkapkan pemikirannya dengan ikhlas, sehingga tidak mungkin terjadi yang satu memanipulasi yang lain tanpa disadarinya.

Apa yang disampaikan oleh Habermas tersebut sangat mirip dengan pandangan Hatta mengenai jalan musyawarah dan mufakat dalam demokrasi. Dalam musyawarah dan mufakat orang tidak lagi memandang perbedaan dan demi kepentingan diri sendiri, namun bagaimana kepentingan individu ini dibahas dan didiskusikan secara komunikatif demi kepentingan bersama.

Lebih lanjut, pengaruh filsafat juga ada dalam pikiran demokrasi Hatta, khususnya yang terkait dengan demokrasi ekonomi. Hatta mengusulkan bahwa harus ada campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi negara agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hatta juga mengusulkan demokrasi ekonomi agar tidak ada ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Artinya, Hatta menolak dominasi kapitalisme dalam bidang ekonomi. Pemikiran ini sangat mirip dengan pemikiran Karl Marx. Dalam karyanya *Das Kapital*, Marx secara terbuka melukiskan kesulitan ekonomi yang dibangun di atas prinsip

¹⁹ *Ibid.*, 16.

produksi model kapitalis. Karya yang dibuat Marx ini berasal dari pengalamannya selama menjadi wartawan yang melihat banyak kemiskinan dalam bidang ekonomi. Karya ini merupakan suatu kritik terhadap sistem ekonomi, terutama terhadap sistem produksi kaum kapitalis yang mengakibatkan perbedaan antar kelas pemilik modal (orang kaya) dan kelas buruh.²⁰ Meskipun Hatta tidak sepenuhnya mengatakan bahwa dia terinspirasi atau setuju dengan Marx, namun paling tidak semangat sosialis Marx ini ada dalam pandangan Hatta.

4.4. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Pemikiran demokrasi Hatta muncul sebagai reaksi atas krisis demokrasi yang terjadi karena penerapan demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Soekarno, khususnya setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tahun 1959. Menanggapi suasana politik kala itu, Hatta menyampaikan kritiknya terhadap sistem demokrasi terpimpin Soekarno dan menuliskannya dalam buku yang berjudul *Demokrasi Kita*.

Dalam karya tersebut, Hatta menjelaskan mengenai demokrasi beranjak dari merefleksikan situasi kehidupan masyarakat di Indonesia di bawah pemerintahan kolonialisme. Penindasan di jaman penjajahan ini membawa situasi rakyat yang tidak makmur karena hidup di bawah tekanan pemerintahan kolonial yang tidak memperdulikan nasib rakyat. Selain itu, pengalaman Hatta studi baik di dalam maupun di luar negeri membuat ia banyak belajar tentang situasi politik di banyak

²⁰ Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm. 79-80.

negara. Hatta juga belajar mengenai situasi politik di negara Barat, khususnya negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi Barat ini juga yang akhirnya menjadi inspirasi bagi pemikirannya terkait sistem pemerintahan yang baik bagi Indonesia. Dari situasi bangsa Indonesia pada zaman penjajahan dan tanggapannya atas penerapan demokrasi Barat, serta melihat situasi Indonesia pada era demokrasi terpimpin inilah kemudian lahir pemikirannya mengenai demokrasi.

Pemikiran Hatta mengenai demokrasi dimulai dengan upaya untuk memurnikan makna Kedaulatan Rakyat. Demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan dalam suatu pemerintahan dan rakyatlah yang berhak menentukan nasib pemerintahan demi kebaikan bersama rakyat itu sendiri. Dalam hal inilah makna Kedaulatan Rakyat ini harus dimurnikan. Hal ini supaya makna Kedaulatan Rakyat tidak disalah-artikan bahwa rakyat bisa bertindak dengan sesuka hati dengan mengatasnamakan Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat harus dimengerti sebagai usaha bersama seluruh rakyat dan bukan demi kepentingan kelompok tertentu saja. Secara singkat dapat penulis artikan bahwa Kedaulatan Rakyat adalah sebuah kekuasaan rakyat untuk mengelola negaranya demi kepentingan bersama, dan bukan demi kepentingan kelompok atau individu tertentu saja. Maka dalam praktek penerapannya, segala usaha, gerakan, atau penyampaian pendapat dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat harus mengutamakan kepentingan umum.

Dalam masyarakat skala kecil seperti di desa, praktek penerapan Kedaulatan Rakyat bisa dilakukan oleh seluruh rakyat dengan cara berkumpul pada suatu tempat dan membahas mengenai suatu persoalan terkait aspirasi terhadap

pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kedaulatan Rakyat harus berlandaskan semangat musyawarah untuk mufakat. Seluruh rakyat dapat menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah tersebut guna memperoleh mufakat demi kebaikan bersama. Aspirasi yang berbeda-beda kemudian disatukan dalam musyawarah tersebut agar dapat memperoleh pemahan terkait hal yang penting bagi perkembangan negara berdasarkan kebutuhan dari rakyat banyak. Namun dalam skala besar atau nasional, musyawarah untuk mufakat ini cukup rumit untuk diterapkan. Wilayah geografis Indonesia yang luas ini tidak memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh rakyat dalam suatu tempat untuk bermusyawarah. Maka dari itu, penerapan Kedaulatan Rakyat akhirnya dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Rakyat memilih sendiri wakilnya guna menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. DPR yang terdiri dari perwakilan berbagai daerah juga harus melakukan musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan segala sesuatu terkait kepentingan rakyat. DPR juga bertugas membuat Undang-Undang (UU) bagi kepentingan rakyat banyak. UU yang dibuat oleh DPR harus melihat aspirasi rakyat banyak dan dibuat dengan jalan musyawarah. Apabila DPR tidak mengutamakan kepentingan rakyat banyak, maka rakyat bisa mengganti DPR tersebut dengan cara tidak memilih mereka lagi dalam pemilihan umum. Demikian juga dengan pemerintah yang tidak menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, sesuai dengan kepentingan rakyat, DPR, sebagai wakil rakyat, bisa melakukan penggantian pemerintah dengan mengajukan mosi tidak percaya. Sebaliknya,

apabila DPR yang keliru dalam mengawasi pemerintah, maka pemerintah dapat membubarkan DPR. Namun, rakyat tetap menjadi penentu bagi kedua lembaga ini. Apabila terjadi saling menyalahkan antara DPR dan pemerintah, maka semuanya bisa dikembalikan kepada rakyat dalam mengadakan pemilihan kembali dalam pemilihan umum. Demikianlah bahwa makna Kedaulatan Rakyat berarti kekuasaan seluruhnya ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan.

Untuk menerapkan makna Kedaulatan Rakyat agar sesuai dengan semangat yang diinginkan, maka diperlukan sebuah pendidikan politik yang layak bagi masyarakat. Pendidikan ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun oleh rakyat sendiri melalui partai politik (parpol) dan bisa juga melalui kelompok organisasi masyarakat (ormas). Pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dilaksanakan dengan cara mengadakan diskusi-diskusi tentang makna Kedaulatan Rakyat bersama masyarakat ataupun bisa diadakan pelatihan-pelatihan bagi rakyat. Sementara pendidikan dari rakyat menuntut adanya kesadaran dan sikap bijaksana dari parpol dan ormas dalam memberikan contoh bagi rakyat mengenai penerapan makna Kedaulatan Rakyat ini. Peran parpol maupun ormas sangat penting dalam hal ini, karena rentan sekali justru kelompok-kelompok parpol atau ormas ini yang memanfaatkan makna Kedaulatan Rakyat demi kepentingan kelompoknya sendiri. Peran parpol juga sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi, terutama dalam penerapan makna Kedaulatan Rakyat ini karena parpol lah yang menjadi wakil yang akan dipilih oleh rakyat, menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam mengelola pemerintahan. Parpol harus memiliki sikap nasionalis dan ideologi kerakyatan yang

kuat agar tidak menyalahgunakan makna Kedaulatan Rakyat ini demi kepentingan kekuasaan kelompok atau individu tertentu saja.

Selain mengenai makna Kedaulatan Rakyat dalam arti politik, penulis juga memaparkan pandangan Hatta mengenai Kedaulatan Rakyat dalam bidang ekonomi. Hatta sangat terkesan dengan semangat demokrasi Barat yang muncul untuk membebaskan rakyat dari penindasan feodalisme. Namun, Hatta juga tidak sepenuhnya menerima penerapan demokrasi Barat yang hanya memikirkan mengenai kehidupan politik saja namun tidak memikirkan masalah ekonomi. Akhirnya yang terjadi di Barat adalah adanya persaingan pasar bebas yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, yaitu kelompok kapitalis. Rakyat yang miskin tidak akan bisa bersaing di pasar sehingga mereka seterusnya akan menjadi budak bagi kaum yang bermodal saja. Dalam hal ini yang kaya, yaitu kaum pemodal akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Semangat inilah yang ditolak oleh Hatta.

Hatta berpandangan bahwa dalam sebuah negara, khususnya negara demokrasi dengan semangat Kedaulatan Rakyat, seluruh masyarakat harus memiliki akses yang sama dalam hal ekonomi. Segala sumberdaya alam, seperti pengelolaan air, tanah, minyak, flora, fauna, tambang emas, dan lain sebagainya harus dikelola untuk kepentingan rakyat banyak secara adil. Setiap masyarakat, terutama yang miskin juga harus diberi kemudahan untuk mengakses permodalan dalam usaha dengan sistem koperasi. Sistem koperasi, yaitu simpan pinjam modal bagi rakyat kecil harus mengedepankan semangat kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Semangat gotong royong dan

kolektivisme harus dikedepankan dalam membangun perekonomian Indonesia. Hal ini menekankan bahwa tidak boleh ada ketimpangan sosial dalam masyarakat agar semua rakyat bisa memperoleh hak yang sama dalam perekonomian dan fasilitas sosial. Maka dapat dikatakan bahwa demokrasi dalam pemikiran Hatta ini harus menjalankan fungsi keduanya, yaitu fungsi politik dan ekonomi. Demokrasi dalam pandangan Hatta adalah penghayatan dan penerapan terhadap makna Kedaulatan Rakyat secara tepat dan adanya keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikianlah akhirnya bahwa dengan merefleksikan kembali demokrasi yang disampaikan Hatta ini, penulis berharap bisa menjadi percikan pengetahuan baru dalam menjalankan sistem demokrasi yang ada di Indonesia serta dengan membaca tulisan ini, penulis berharap para pembaca dapat mendapat inspirasi yang berguna bagi pengetahuan politik, khususnya terkait dengan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER UTAMA

Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*, Bandung: Segi Arsy, 2014.

SUMBER BUKU-BUKU

Alfarizi, Salman, *Mohammad Hatta, Biografi Singkat 1902 – 1980*,
Jogjakarta:GARASI, 2017.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*,
Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Dua, Mikhael, *Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*,
Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Hatta, Mohammad, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2*, Jakarta: LP3ES, 2000.

Noer, Deliar, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, Jakarta:LP3S, 1990.

_____, *Mohammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*, Jakarta: Kompas, 2012.

Riff, Michael A., *Kamus Ideologi Politik Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1995.

Rousseau, Jean Jacques, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta:

Visimedia.

Russell, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat, dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio*

Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Seri Buku Tempo, *Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman*, Jakarta:KPG,

Bekerjasama dengan Majalah Tempo, 2010.

Suleman, Zulkifri, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*,

Jakarta: Kompas, 2010.

Wicaksana, Anom Whani, *Mohammad Hatta, Hidup Jujur dan Sederhana Untuk*

Indonesia, (tanpa kota terbit): C-Klik Media, 2018.

SUMBER MAKALAH

Hendrawan, Datu, Makalah *Extension Course 2016, Bonum Commune Dalam*

Teori-Teori Kritis (Upaya Membentuk Masyarakat Kritis), Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2016.

SUMBER INTERNET

(tanpa nama penulis), (tanpa judul),

[https://library.binus.ac.id/eColls/eThesdoc/Bab2/2015-1-01793-](https://library.binus.ac.id/eColls/eThesdoc/Bab2/2015-1-01793-MN%20Bab2001.pdf)

[MN%20Bab2001.pdf](https://library.binus.ac.id/eColls/eThesdoc/Bab2/2015-1-01793-MN%20Bab2001.pdf), (diakses pada 02 Mei 2018, pukul 22.20 WIB).

(Tanpa nama penulis), *Demokrasi Indonesia, Apakah Memang Sudah*

'*Kebablasan?*', 23 Februari 2017, [http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-](http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39051571)

[39051571](http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39051571) (diakses pada 9 September 2017, pukul 10.00 WIB).

(Tanpa nama penulis), *Demokrasi Indonesia, Apakah Memang Sudah*

'*Kebablasan?*', 23 Februari 2017, [http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-](http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39051571)

[39051571](http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39051571) (diakses pada 9 September 2017, pukul 10.00 WIB).

(Tanpa nama penulis), *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi*, (Tanpa

Tanggal

Publikasi),

[https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/04/1241/indeks-demokrasi-](https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/04/1241/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi-2009-2016.html)

[indonesia-idi-menurut-provinsi-2009-2016.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/04/1241/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi-2009-2016.html), (diakses pada 13 April 2018,

pukul 18:40:54 WIB).

Ayuwuragil, Kustin, *Survei LIPI: Isu SARA Berpotensi Hambat Pemilu 2019*, 8

Agustus 2018, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808090003-32-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808090003-32-320434/survei-lipi-isu-sara-berpotensi-hambat-pemilu-2019)

[320434/survei-lipi-isu-sara-berpotensi-hambat-pemilu-2019](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808090003-32-320434/survei-lipi-isu-sara-berpotensi-hambat-pemilu-2019), (diakses pada 28

Januari 2019, pukul 17:04 WIB).

Dhani, Arman, *Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa*, 1 September 2016, <https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp>, (diakses pada 29 Maret 2019, pukul 09.28 WIB).

Gabrillin, Abba, *Kebebasan Sipil Masih Menjadi Masalah dalam Indeks Demokrasi Indonesia*, 15 Desember 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/18524511/kebebasan-sipil-masih-jadi-masalah-dalam-indeks-demokrasi-indonesia>, (diakses pada 13 April 2018, pukul 18.44 WIB).

Maryono, *Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulis dan Karya-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik*, (tanpa tanggal publikasi), <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=408912&val=7131&title=BUNG%20HATTA,%20PROKLAMATOR,%20ILMUWAN,%20PENULIS%20DAN%20KARMA-KARYANYA:%20SEBUAH%20ANALISIS%20BIO-BIBLIOMETRIK.pdf>, (diakses pada 17 Agustus 2018, pukul 18:21 WIB).

Masrury, Buchory, *Demokrasi Kita Oleh Bung Hatta*, 17 Juli 2017, <http://kanalbaca.com/lectura/demokrasi-kita-oleh-bung-hatta/>, (diakses pada 4 Maret 2019, pukul 14.50 WIB).

Matanasi, Petrik, *Cara Legendaris ala Hatta Mengkritik Sukarno*, 7 Februari 2017, <https://tirto.id/cara-legendaris-ala-hatta-mengkritik-sukarno-ciyQ>, (diakses pada 23 Februari 2019, pukul 9.37 WIB).

- Nur Khalika, Nindias, *Lingkaran Setan Ketimpangan Sosial di Indonesia*, 26 Februari 2018, <https://tirto.id/lingkaran-setan-ketimpangan-sosial-di-indonesia-cFhB>, (diakses pada 8 April 2018, pukul 11.38 WIB).
- Riski, Petrus, *Aktivis HAM Jawa Timur Kecam Aksi Penyerangan Kantor YLBHI dan LBH*, 18 September 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-ham-jatim-kecam-aksi-penyerangan-kantor-ylbhi-dan-lbh/4033536.html>, (diakses pada 21 November 2017, pukul 17:38:54 WIB).
- Rudi, Alsadad, Fabian Januarius Kuwado, *Jokowi: Kerusuhan Usai Demonstrasi 4 November Ditunggangi Aktor Politik*, 5 November 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/05/00232741/jokowi.kerusuhan.usai.demonstrasi.4.november.ditunggangi.aktor.politik>, (diakses pada 10 November 2016 pukul 20.25 WIB).
- Teman Sejarah, *Revolusi Perancis 1089-1979*, 30 Januari 2017, <http://www.hariansejarah.id/2017/01/revolusi-perancis-1789-1799.html>, (diakses pada 28 Februari 2019, pukul 14.12 WIB).
- Tempo.co, *Detik-Detik Penyerangan Kantor LBH Jakarta*, 18 September 2017, <https://nasional.tempo.co/read/910039/detik-detik-penyerangan-kantor-lbh-jakarta>, (diakses pada 21 November 2017, pukul 17:40:50 WIB).
- Yenny Tjoe, *Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?*, 31 Agustus 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/31/100200826/seberapa>

[parah-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia-](#), (diakses pada 28 Januari 2019,
pukul 17.18 WIB).